

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, 2005, *Hukum Acara Peradilan TUN*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adisapoetra. Prins-R. Kosim, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta.
- Aminudin dan Asikin Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa. Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- _____, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bachar. Djazuli, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Basah. Sjachran, 1992, *Menelaah Liku-Liku Rancangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung.
- _____, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung
- Budiardjo. Miriam, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Chaidir. Ellydar, 2007, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Gautama. Sudarga, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Hadjon. Philipus M., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh*

*Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan
Peradilan Administrasi, Peradaban, Surabaya.*

Hadjon. Philipus M. dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia
(Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta.

Harahap. M. Yahya, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang
Perdata edisi kedua*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap. Zairin, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali
Pers, Jakarta.

Huda. Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan
ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda. Ni'matul & R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan
Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.

Ilmar. Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintah*, Kencana, Jakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara*, Buku II, cetakan keempat, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta

Jeddawi. Murtir, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media,
Yogyakarta.

Lotulung. Paulus Effendie, 1986, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi
Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Bhuana Pancakarsa.

_____, 1995, *Eksekusi Putusan PTUN dan
Problematikanya dalam Praktik*, Machrup Elrick (Editor), dalam
*Kapita Selekta Hukum: Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno
Adji*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan
Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta.

Mahfud MD. Moh., 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII
Press, Yogyakarta.

Manan. Bagir, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua, FH UII
Press, Yogyakarta.

_____, 2007, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.

Mertokusumo. Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2005, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cetakan ketiga, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Eddy Pranjoto, 2006, *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*, Penerbit CV. Utomo, Bandung.

Prodjodikoro. Wirjono, 1982, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cetakan kesembilan, Sumur Bandung, Bandung.

Rahardjo. Satjipto, 2004, *Manusia dalam Hukum Indonesia, dalam sisi-sisi lain Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, UII Press, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.

R. Subekti, 1980, *Hukum Pembuktian*, Cet-5, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Soeroso, 2001, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Wiyono, 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Sadjjono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

S.F Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sibuea. Hotma P, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.

- Sinaga. Budiman N.P.D, 2009, *Hukum Tata Negara, Perubahan Undang-Undang Dasar*, Tatanusa, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono, 2007, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Jumimetri*, Cetakan II, Balai Aksara, Yogyakarta.
- Soeparmo, 2000, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ketiga, Bina Cipta, Bandung.
- Sumardjono. Maria S.W., 2011, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Pedoman Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- Tjandra. W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Triwulan. Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Kencana, Jakarta.
- Utama. Yos Johan, 2010, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Warassih. Esmi, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandharu Utama, Semarang.
- Wiwoho. Jamal, 2013, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

B. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

C. Penelitian/Jurnal

Agus Budi Susilo, *Makalah* “Eksistensi Peradilan Administrasi Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Sistem Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Di Indonesia”, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Andriyani Masyitoh, 2011, “Pengadilan Pajak Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan”, *Tesis*, Magister Hukum Program Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta.

Enny Agustina, 2014, *Ringkasan Disertasi Penyelesaian Sengketa Kepengawain Dalam Sistem PTUN*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Era Yustika Adillah, 2010, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Risalah Lelang Atas Lelang eksekusi Putusan Pengadilan No. 64/Pdt.G/1991/PN.Yk. dengan Adanya Putusan Kasasi No. 1817 K/PDT/2000”, *Tesis*, Magister Hukum Program Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta.

Febby Fajrurrahman, *Makalah* “Pelaksanaan Putusan dan Fungsi Kejurusitaan Di Peradilan TUN”, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Maisara Sunge, *Jurnal* “Efektifitas Eksekusi Putusan PTUN”, *Inovasi*, Volume 6, Nomor 4, Desember 2009 ISSN 1693-9034.

Novianto M. Hantoro, Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Buku Kesatu, Bagian Pertama Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi.

Stanley Adi Prasetyo, *Makalah* “Informasi Publik dan Hak Asasi Manusia”, disampaikan dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Perpustakaan Universitas Kristen Petra pada 26 Juli 2010 di Kampus UK Petra, Surabaya.

Umar Dani, *Makalah* “Konsep Sanksi dalam RUU-AP (Suatu upaya penguatan pelaksanaan putusan PTUN)”, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

D. Artikel/ Internet

Dahnial Khumarga, Makalah “Persamaan dan Nuansa Perbedaan Antara Corak Peradilan Tata Usaha Negara Perancis, Belanda dan Indonesia”, hlm. 21 http://dspace.library.uph.edu:8080/bitstream/123456789/798/2/lw-01-01-2001-persamaan_dan_nuansa_perbedaan.pdf, diakses pada tanggal 30 Januari 2015.

Administrator, Artikel “Sejarah Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara” <http://www.ptun-medan.go.id/halkomentar-125-sejarah-lahirnya-peradilan-tata-usaha-3.html> diakses pada tanggal 31 Januari 2015.

E. Wawancara

Nursyam Bagus Sudharsono selaku Panitera/Sekretaris dan S. Hendarto selaku Panitera Muda Perkara PTUN Surabaya dalam wawancara tanggal 12 November 2014

Ilham Hamir selaku Panitera/ Sekretaris PTUN Semarang dalam wawancara tanggal 1 Desember 2014